

ABSTRAK

“Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 486/Pdt/2019/PT MDN Tentang Mendirikan Bangunan Tanpa Izin”

Lia Anggraini Gultom

Pembangunan infrastruktur fisik memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan perkembangan kawasan perkotaan. Namun, seringkali muncul permasalahan hukum akibat pembangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 486/Pdt/2019/PT MDN terkait pembangunan tanpa izin dan dampaknya terhadap tata kelola pembangunan berkelanjutan.

Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum, dianalisis secara kualitatif untuk memahami penerapan hukum dalam kasus ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian bangunan tanpa IMB melanggar ketentuan hukum, yang berdampak pada penyitaan aset, sanksi administratif, gugatan ganti rugi, dan konflik sosial. Mahkamah Agung menyoroti pentingnya legalitas dokumen kepemilikan tanah serta perlindungan terhadap kepentingan publik. Kasus ini juga menegaskan bahwa pembangunan tanpa izin dapat mengganggu tata ruang, lingkungan, dan keadilan sosial.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keabsahan dokumen dan kepatuhan terhadap regulasi IMB adalah syarat utama dalam menjaga ketertiban umum dan mencegah konflik hukum. Rekomendasi meliputi digitalisasi administrasi pertanahan, peningkatan sosialisasi terkait IMB, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk mengurangi pelanggaran dan menjaga keberlanjutan pembangunan.

Kata Kunci : Pembangunan Tanpa Izin, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sengketa pertanahan

ABSTRACT

“Legal Review of Supreme Court Decision Number 486/Pdt/2019/PT MDN Concerning Building Construction Without a Permit”

Lia Anggraini Gultom

The development of physical infrastructure plays an important role in supporting community needs and the development of urban areas. However, legal problems often arise due to construction without a Building Construction Permit (IMB). This study examines the legal considerations in the Supreme Court Decision Number 486/Pdt/2019/PT MDN regarding construction without a permit and its impact on sustainable development governance.

The study uses a normative legal method with a descriptive-analytical approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials, such as court decisions, laws and regulations, and legal doctrines, are analyzed qualitatively to understand the application of the law in this case.

The results of the study show that the construction of buildings without a Building Construction Permit violates legal provisions, which have an impact on asset confiscation, administrative sanctions, compensation claims, and social conflicts. The Supreme Court highlighted the importance of the legality of land ownership documents and protection of public interests. This case also emphasizes that construction without a permit can disrupt spatial planning, the environment, and social justice.

The conclusion of this study emphasizes that the validity of documents and compliance with IMB regulations are the main requirements in maintaining public order and preventing legal conflicts. Recommendations include digitizing land administration, increasing socialization regarding IMB, and stricter law enforcement to reduce violations and maintain sustainable development.

Kata Kunci : Pembangunan Tanpa Izin, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sengketa pertanahan